



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 73);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 73) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 98

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 98 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 73  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang

<i>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</i>	1
---	---

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai

<i>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</i>	2
---	---

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	3
---	---



- yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	4
---	---

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	5
---	---

- Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023	6
--	---

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 73);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	8
---	---

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

<i>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</i>	9
---	---

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra**

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	10
---	----



**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program**  
**Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun**  
**2019-2024 Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>21.813.969.876</b>	<b>70,44</b>	<b>15.364.981.135</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.138.969.876	51,19	3.142.315.836
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.650.000.000	12,95	213.704.648
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	2.475.000.000	133,24	3.297.697.707
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.750.000.000	88,12	2.423.309.051
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	550.000.000	58,80	323.395.763
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.250.000.000	72,30	5.964.558.130
<b>JUMLAH</b>	<b>21.813.969.876</b>	<b>70,44</b>	<b>15.364.981.135</b>

Sumber : Perubahan RENSTRA Bakesbangpol Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 21.813.969.876,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.364.981.135,00 atau sebesar 70,44%. Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, telah melebihi pagu indikatif renstra karena terjadi kenaikan hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

### **2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA**

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 90,33% untuk target kinerja dan 97,60% untuk target anggaran.



**Tabel 2.2**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**RENSTRA Bakesbangpol Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>90,33</b>	<b>97,60</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	91,51
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	90	95,09
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	72	99,86
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	90	99,97
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	90	99,72
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100	99,49
<b>JUMLAH</b>	<b>90,33</b>	<b>97,60</b>

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

## 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

### 2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran**  
**RENJA Bakesbangpol Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>26.245.921.876</b>	<b>58,54</b>	<b>15.364.981.135</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.389.684.981	33,47	3.142.315.836

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	12
---	----

<b>Nama Urusan dan Program</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b>	<b>% Realisasi thd Renja</b>	<b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	649.660.400	32,89	213.704.648
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	5.334.623.600	61,82	3.297.697.707
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.699.016.920	89,78	2.423.309.051
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	476.327.400	67,89	323.395.763
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	7.696.608.575	77,50	5.964.558.130
<b>JUMLAH</b>	<b>26.245.921.876</b>	<b>58,54</b>	<b>15.364.981.135</b>

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah 58,54%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

### **2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA**

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Bakesbangpol Garut Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 50,00% untuk target kinerja, dan 58,54% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**Renja Bakesbangpol Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>50,00</b>	<b>58,54</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50,00	33,47
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	50,00	32,89
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	50,00	61,82
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50,00	89,78
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	50,00	67,89
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	50,00	77,50
<b>JUMLAH</b>	<b>50,00</b>	<b>58,54</b>

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kabupaten Garut Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Bakesbangpol Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023	14
--	----

**Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100		
8	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
8	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
8	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
8	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100	30 Orang/bulan	100
8	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
8	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
8	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42 Paket	42 Paket	42 Paket	100	42 Paket	100
8	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100
8	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	100

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	15
---	----

						Disediakan														
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100						
8	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100						
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100						
8	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100						
8	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100						
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100						
8	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100						
8	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	49 Unit	49 Unit	49 Unit	49 Unit	100	49 Unit	49 Unit	100						
8	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	11 Unit	100						
8	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100						
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100						
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100						
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100						
8	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100						
8	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	14 Unit	100						
8	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	14 Unit	100						
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90%	90%	90%	90%	100	90%	90%	100						
8	01	02	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100						
8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1395 Orang	874 Orang	835 Orang	835 Orang	100	1395 Orang	1395 Orang	100						
8	01	03			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	72%	72%	72%	72%	100	72%	72%	100						

8	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	03	2,01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	354 Orang	444 Orang	407 Orang	407 Orang	100	354 Orang	354 Orang	100
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Aktif	90%	90%	90%	90%	100	90%	90%	100
8	01	04	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	340 Orang	340 Orang	340 Orang	340 Orang	100	340 Orang	340 Orang	100
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi	90%	90%	90%	90%	100	90%	90%	100
8	01	05	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	508 Orang	565 Orang	582 Orang	582 Orang	100	508 Orang	508 Orang	100
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
8	01	06	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	17
---	----

					Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Konflik Sosial yang Disusun								
8	01	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2913 Orang	14256 Orang	7078 Orang	7078 Orang	100	2913 Orang	2913 Orang	100
8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	53568 Orang	9836 Orang	32532 Orang	32532 Orang	100	53568 Orang	53568 Orang	100
8	01	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sumber : Evaluasi Renstra Sampai Dengan Tahun 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp26.245.921.876,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp15.364.981.135,00 atau mencapai 90%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

**Tabel 2. 6**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sampai dengan triwulan II**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.389.684.981	3.142.315.836	33,47
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.378.150	22.066.750	16,06
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.593.750	9.843.750	92,92
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.750.000	4.750.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.750.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.750.000	4.750.000	100,00



	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.750.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.446.000	2.723.000	50,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.338.400	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.569.787.926	1.705.977.113	47,79
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.551.787.926	1.699.477.113	47,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13.000.000	6.500.000	50,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	2.500.000	50,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	2.500.000	50,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	2.500.000	50,00

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	2.500.000	50,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.653.135	163.244.005	41,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.800.000	12.800.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.176.715	29.538.513	49,09
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.092.600	11.092.600	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.682.800	26.800.892	45,67
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.612.000	4.806.000	50,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.250.000	18.056.400	54,30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.585.420	43.468.500	45,48
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.681.100	16.681.100	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	97.772.500	-	-
	Pengadaan Barang Milik	4.928.480.000	1.082.362.900	21,96

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.154.480.000	1.016.429.800	88,04
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.774.000.000	65.933.100	1,75
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.095.770	69.272.568	27,81
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	3.000.000	50,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.550	7.679.435	38,40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.095.220	58.593.133	26,26
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.290.000	94.392.500	95,07
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.250.000	50.996.200	92,30
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	29.840.000	29.196.300	97,84

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	14.200.000	100,00
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	649.660.400	213.704.648	32,89
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	649.660.400	213.704.648	32,89
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	252.600	252.120	99,81
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	252.600	252.120	99,81
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	498.954.800	103.247.583	20,69

	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	99.780.400	59.565.156	59,70
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	420.000	420.000	100,00
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50.000.000	49.967.669	99,94
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	5.334.623.600	3.297.697.707	61,82

	SERTA BUDAYA POLITIK			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.334.623.600	3.297.697.707	61,82
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	252.600	252.120	99,81
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	252.600	252.120	99,81

	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.322.652.300	3.288.240.512	61,78
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.046.100	8.952.955	81,05
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	420.000	-	-

	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.699.016.920	2.423.309.051	89,78
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.699.016.920	2.423.309.051	89,78
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.513.600	1.507.552	99,60
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.793.600	1.792.320	99,93
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	2.680.670.800	2.412.579.179	90,00



	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.510.000	7.430.000	59,39
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.528.920	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	476.327.400	323.395.763	67,89
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	476.327.400	323.395.763	67,89
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	3.167.200	3.155.104	99,62

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.157.800	2.156.360	99,93
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	461.691.000	318.084.299	68,90
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.160.400	-	-

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.151.000	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	7.696.608.575	5.964.558.130	77,50
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7.696.608.575	5.964.558.130	77,50
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	2.462.400	2.462.400	100,00

	Penanganan Konflik di Daerah			
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.462.400	2.462.400	100,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.274.317.600	1.382.555.650	60,79
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	1.162.772.575	527.713.680	45,38

	Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.593.600	-	-
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4.250.000.000	4.049.364.000	95,28
	JUMLAH	26.245.921.876	15.364.981.135	58,54

**Sumber : SIPKD, 2023**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 47 subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut belum semuanya terlaksana karena pelaksanaannya setelah Triwulan II. Selain itu, terdapat 9 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena kegiatan tersebut sudah terlaksana sebelum berakhirnya Triwulan II.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan aktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Penambahan pagu untuk kegiatan hibah ormas
2. Penambahan pagu untuk mrnfukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	33
---	----

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

Urusan/ Bidang Urusan Pemerint ahan Daerah dan Program /Kegiata n	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keg iatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingk at Capai an Kinerj a dan Realis asi Angga ran Renst ra Peran gkat Daera h kabup aten s/d tahun 2024 (%)		Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Jawa b		
								I		II		III		IV											
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									K	Rp. (000)
Urusan Pemerint ahan Umum																									
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			85.371. 726.54 6		36.443.5 35.154		26.245. 921.87 6		2.144. 730.80 1		13.220. 250.33 4		-		-		15.364. 981.13 5		58,54		51.808.516. 289		60 ,6 9	Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	
PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja	%	1 0 0	22.634. 233.54 6	1 0 0	8.236.61 1.460	1 0 0	9.389.6 84.981	25	777.17 3.599	25	2.365.1 42.237				50	3.142.3 15.836	50,0 0	33,47		11.378.927. 296		50 ,2 7	Sekret aris	

TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		1	137.378.150	1	9.543.750	-	12.523.000			1	22.066.750	100,00	16,06					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		1	10.593.750	1	6.843.750	-	3.000.000			1	9.843.750	100,00	92,92					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		1		1	4.750.000	1	1.350.000	-	3.400.000			1	4.750.000	100,00	100,00					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		1		1	4.750.000	-	0	-	0			-	-	-	-					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1		1		1	4.750.000	1	1.350.000	-	3.400.000			1	4.750.000	100,00	100,00					



	Dokumen DPA-SKPD																						
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	4.750.000	-	0	-	0					-	-	-	-					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	5.446.000	-	0	-	2.723.000				-	2.723.000	-	50,00						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	102.338.400	-	0	-	0				-	-	-	-						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	3.569.787.926	1	619.106.647	-	1.086.870.466			1	1.705.977.113	100,00	47,79							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	35	35	3.551.787.926	35	619.106.647	-	1.080.370.466			35	1.699.477.113	100,00	47,85							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1	1	5.000.000	-	0	-	0			-	-	-	-							

Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1		1		1	13.000.000	-	0	1	6.500.000				1	6.500.000	100,00	50,00		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		1	5.000.000	-	0	1	2.500.000				1	2.500.000	100,00	50,00		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1		1		1	5.000.000	-	0	1	2.500.000				1	2.500.000	100,00	50,00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		1	5.000.000	-	0	1	2.500.000				1	2.500.000	100,00	50,00		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1		1		1	5.000.000	-	0	1	2.500.000				1	2.500.000	100,00	50,00		

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		1	395.653.135	1	93.777.605	-	69.466.400				1	163.244.005	100,00	41,26				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1		1		1	12.800.000	-	0	1	12.800.000				1	12.800.000	100,00	100,00				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1		1		1	60.176.715	1	29.538.513	-	0				1	29.538.513	100,00	49,09				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1		1		1	11.092.600	-	0	1	11.092.600				1	11.092.600	100,00	100,00				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1		1		1	58.682.800	1	26.800.892	-	0				1	26.800.892	100,00	45,67				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1		1		1	9.612.000	1	3.111.000	-	1.695.000				1	4.806.000	100,00	50,00				
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1		1		1	33.250.000	1	5.502.900	-	12.553.500				1	18.056.400	100,00	54,30				
Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	1		1		1	95.585.420	1	12.143.200	-	31.325.300				1	43.468.500	100,00	45,48				

Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1		1		1	16.681.100	1	16.681.100	-	0			1	16.681.100	100,00	100,00									
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1		1		1	97.772.500	-	0	-	0			-	-	-	-									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		1	4.928.480.000	1	4.479.800	-	1.077.883.100			1	1.082.362.900	100,00	21,96									
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3		3		3	1.154.480.000	-	4.479.800	3	1.011.950.000			3	1.016.429.800	100,00	88,04									
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		1		1	3.774.000.000	-	0	1	65.933.100			1	65.933.100	100,00	1,75									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Dokumen	1		1		1	249.095.770	1	17.781.797	-	51.490.771			1	69.272.568	100,00	27,81									

ahan Daerah	Pemerintahan Daerah																			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	6.000.000	1	3.000.000	-	0			1	3.000.000	100,00	50,00				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	20.000.550	1	1.306.797	-	6.372.638			1	7.679.435	100,00	38,40				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	223.095.220	1	13.475.000	-	45.118.133			1	58.593.133	100,00	26,26				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	1	99.290.000	1	32.484.000	-	61.908.500			1	94.392.500	100,00	95,07				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	15	55.250.000	5	19.500.000	9	31.496.200			14	50.996.200	93,33	92,30				

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3		3		3	29.840.000	1	7.304.000	2	21.892.300				3	29.196.300	100,00	97,84					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10		10		10	14.200.000	4	5.680.000	6	8.520.000				10	14.200.000	100,00	100,00					
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	%	90	5.303.405.100	90	821.780.000	90	649.660.400	23	97.068.579	23	116.636.069				45	213.704.648	50,00	32,89	1.035.484.648			19,52	Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1		1		1	649.660.400	1	97.068.579	-	116.636.069				1	213.704.648	100,00	32,89					
Penyusunan Program	Jumlah Dokumen Program Kerja	Dokumen	1		1		1	252.600	1	252.120	-	0				1	252.120	100,00	99,81					



Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																							
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1 7 5		1 7 5		1 7 5	99.780. 400	25	15.163 .156	10 0	44.402. 000			125	59.565. 156	71,4 3	59,70						
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1		1		1	420.00 0	1	420.00 0	-	0			1	420.00 0	100, 00	100,00						



Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																							
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	250	250	250	250	50.000.000	-	0	250	49.967.669				250	49.967.669	100,00	99,94					
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	%	72	15.553.338.000	72	6.029.845.738	72	5.334.623.600	18	25.510.352	18	3.272.187.355			36	3.297.697.707	50,00	61,82			9.327.543.445	59,97	Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan

DAN PENGEM BANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																										
Perumus an Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksan aan Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokra si, Fasilitasi Kelembag aan Pemerint ahan, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanta uan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun	Doku men	1		1		1	5.334.6 23.600	1	25.510 .352	-	3.272.1 87.355				1	3.297.6 97.707	100, 00	61,82							
Penyusun an Program Kerja di Bidang Pendidika	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Doku men	1		1		1	252.60 0	1	252.12 0	-	0				1	252.12 0	100, 00	99,81							

n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun																							
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	252.600	1	252.120	-	0				1	252.120	100,00	99,81							

Politik, Pemilihan Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																																						
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1 0 2 0	1 0 2 0	1 0 2 0	5.322.6 52.300	25 5	24.656 .112	25 5	3.263.5 84.400		510	3.288.2 40.512	50,0 0	61,78																							
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan	Orang	1 3 8	1 3 8	1 3 8	11.046. 100	5	350.00 0	11 5	8.602.9 55		120	8.952.9 55	86,9 6	81,05																							

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																											
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Laporan	1		1		1	420.000	-	0	-	0				-	-	-	-									

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Situasi Politik di Daerah																								
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Aktif	%	90	10.226.200.000	90	5.269.462.456	90	2.699.016.920	23	18.705.042	23	2.404.604.009			45	2.423.309.051	50,00	89,78		7.692.771.507			75,23	Bidang Ketahanan Bangsa	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	Dokumen	1		1		1	2.699.016.920	1	18.705.042	-	2.404.604.009			1	2.423.309.051	100,00	89,78							
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,	Dokumen	1		1		1	1.513.600	1	1.507.552	-	0			1	1.507.552	100,00	99,60							

an Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun																								
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1		1		1	1.793.600	-	0	1	1.792.320				1	1.792.320	100,00	99,93						
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Orang	140		140		140	2.680.670.800	35	17.197.490	70	2.395.381.689				105	2.412.579.179	75,00	90,00						

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																					
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	8		8		8	12.510.000	-	0	4	7.430.000			4	7.430.000	50,00	59,39				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1		1		1	2.528.920	-	0	-	0			-	-	-	-				





n Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																							
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1		1		1	2.157.800	-	0	1	2.156.360			1	2.156.360	100,00	99,93					
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Umat	Orang	540		540		540	461.691.000	60	26.005.425	240	292.078.874			300	318.084.299	55,56	68,90					

Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	8		8		8	5.160.400	-	0	-	0				-	-	-	-				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	Laporan	1		1		1	4.151.000	-	0	-	0				-	-	-	-				

Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																									
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	100	29.537.607.400	100	15.017.165.200	100	7.696.608.575	25	1.197.112.700	25	4.767.445.430				50	5.964.558.130	50,00	77,50		20.981.723.330			71,03	Bidang Kewaspadaan Dini Daerah	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun	Dokumen	1		1		1	7.696.608.575	1	1.197.112.700	-	4.767.445.430				1	5.964.558.130	100,00	77,50							

Konflik Sosial																						
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1		1		1	2.462.400	1	2.462.400	-	0					1	2.462.400	100,00	100,00		
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Dokumen	1		1		1	2.462.400	-	0	1	2.462.400					1	2.462.400	100,00	100,00		

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																						
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5705	5705	5705	2.274.317.600	94	105.370.900	1.139	1.277.184.750				1.233	1.382.555.650	21,61	60,79						

daan, serta Penangan an Konflik di Daerah																																																		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	3 2 1 8		3 2 1 8		3 2 1 8	1.162.7 72.575	31 2	89.279 .400	1.3 12	438.43 4.280					1.6 24	527.71 3.680	50,4 7	45,38																														
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	Laporan	1		1		1	4.593.6 00	-	0	-	0					-	-	-	-																														

Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																					
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1		1	4.250.000.000	1	1.000.000.000		3.049.364.000				1	4.049.364.000	100,00	95,28			

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2023

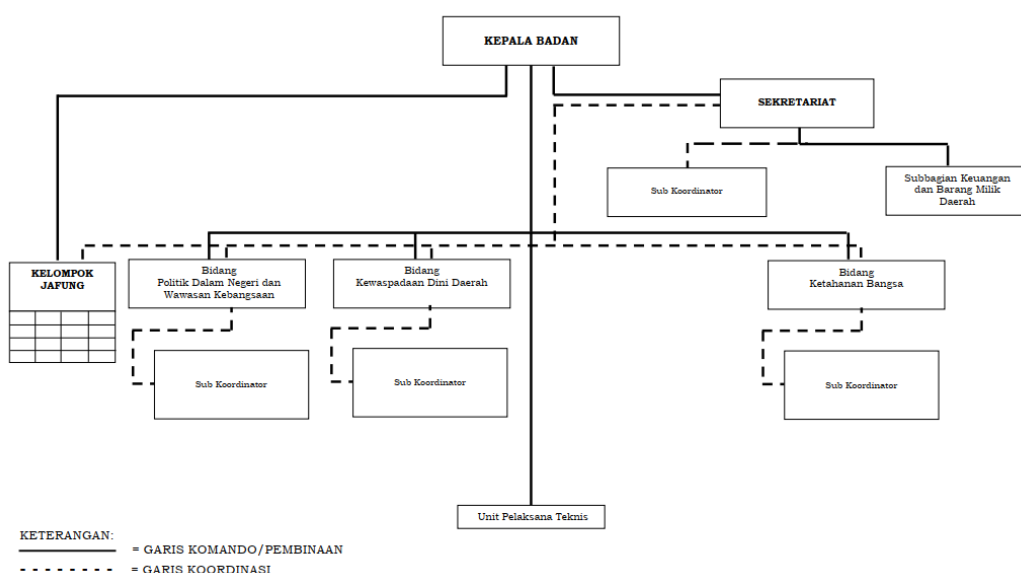


### 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 2. 1 Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**



Sumber: Perbup No 235 Tahun 2021

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023	60
--	----

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

Tugas dan fungsi Badan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan kesatuan bangsa dan politik, politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini daerah, ketahanan bangsa. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahkan :**

- a. Sekretariat
- b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan
- c. Bidang Kewaspadaan Dini Daerah
- d. Bidang Ketahanan Bangsa dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi Dinas meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan dan evaluasi pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan Badan;

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023	
	61

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretaris membawahkan:**

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
- c. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian merupakan kelompok koordinator umum dan kepegawaian yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan umum dan kepegawaian yang dapat dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional.

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan merupakan kelompok koordinator perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang dapat dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan berdasarkan Rencana Strategis Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan:**

- a. Sub Koordinator Fasilitasi Partai Politik, Pemilu dan Pendidikan Politik; dan
- b. Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan.

Sub Koordinator Fasilitasi Partai Politik, Pemilu dan Pendidikan Politik memiliki tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi partai politik, pemilu dan pendidikan politik yang dapat dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional.

Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan memiliki tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan yang dapat dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional.

Bidang Kewaspadaan Dini Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kewaspadaan dini daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Kewaspadaan Dini Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Kewaspadaan Dini Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Kewaspadaan Dini Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah membawahkan:**

- a. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
- b. Sub Koordinator Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing.

Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen memiliki tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen yang dapat dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional.

Sub Koordinator Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing memiliki tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing yang dapat dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional.

Bidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketahanan bangsa berdasarkan Rencana Strategis Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Ketahanan Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Ketahanan Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Ketahanan Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Ketahanan Bangsa membawahkan:**

- a. Sub Koordinator Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi; dan
- b. Sub Koordinator Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Ormas.

Sub Koordinator Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi

memiliki tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi yang dapat dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional.

Sub Koordinator Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Ormas memiliki tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan ormas yang dapat dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

<i>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</i>	65

**Tabel 2. 9**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP			150 Tomas dan 14 Orma s/ LSM	150 Tomas dan 14 Orma s/ LSM	150 Tomas dan 14 Orma s/ LSM	150 Tomas dan 14 Orma s/ LSM	340 Orang dan 59 Orma s/ LSM	340 Orang dan 59 Orma s/ LSM	340 Orang dan 59 Orma s/ LSM	340 Orang dan 59 Orma s/ LSM	
2	Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan			1360 Orang	1360 Orang	1360 Orang	1360 Orang	835 Orang	835 Orang	2000 Orang	2000 Orang	
3	Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban		3215	31800 Orang	31800 Orang	31800 Orang	31800 Orang	39610 Orang	39610 Orang	39610 Orang	39610 Orang	
4	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu		3,199	72%	n/a	72%	72%	78,91 %	n/a	78,91 %	78,91 %	

Sumber : Evaluasi Renstra Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 4 (empat) indikator capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022, ada 1 (satu) indikator yang pada kondisi akhir tidak mencapai target karena keterbatasan anggaran yaitu Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan dan ada 1 (satu) indikator yang pada kondisi akhir tidak dapat dihitung yaitu Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu karena tidak ada Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada/Pilkades sebagai dasar perhitungan indikator;
2. Indikator yang pada kondisi akhir melebihi target sebanyak 2 (dua) indikator yaitu Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dan Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target dan indikator, adalah karena indikator tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dikarenakan tidak semua indikator yang hingga akhir tahun anggaran 2022 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun ke 3 pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun pada Tahun 2023, indikator Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan diproyeksikan akan melebihi target karena ada penambahan kegiatan yaitu kegiatan Paskibraka.

#### **2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Masuknya Era Globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
- 2) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali



menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.

3) Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1) Belum optimalnya pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial politik yang dinamis dalam mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di daerah dengan membuka komunikasi dan integrasi sosial politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen masyarakat.

2) Belum optimalnya kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Garut

Belum optimalnya pendataan dan pembinaan LSM, Ormas, Organisasi Politik serta Organisasi Masyarakat lainnya, dalam rangka pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga.

## **2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan

pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
  - c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik;
  - d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
  - f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 56 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.596.837.795,- telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 adalah sebesar Rp. Rp26.596.837.795,-. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Bakesbangpol Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp136.296.883.844,- mengalami penyesuaian sebesar Rp111.609.189.407,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp24.687.694.437,- dan pada Parsial 1 menjadi Rp24.245.921.876,- lalu pada Parsial 2 menjadi Rp26.245.921.876,- kemudian pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp26.596.837.795,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut..
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2. 10**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023**

**Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
No	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK ASI	TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKA SI	TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATA N PENTIN G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					
	<b>8.01.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				26.596.837. 795	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				26.596.837.7 95	
	<b>8.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	Kab. Garut	100%	9.279.900.9 00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	Kab. Garut	100%	9.279.900.90 0	
	<b>8.01.01.2, 01.</b>	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	137.378.150	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	137.378.150	
	8.01.01.2, 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Dokumen	10.593.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Dokumen	10.593.750	
	8.01.01.2, 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	

8.01.01.2, 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	
8.01.01.2, 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	
8.01.01.2, 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	4.750.000	
8.01.01.2, 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.446.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.446.000	
8.01.01.2, 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	102.338.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	102.338.400	
<b>8.01.01.2, 02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	3.460.003.845	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	3.460.003.845	
8.01.01.2, 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	35 Orang/bul	3.442.003.845	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	35 Orang/bul	3.442.003.845	
8.01.01.2, 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.000.000	
8.01.01.2, 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	13.000.000	
<b>8.01.01.2, 03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000	

			<b>Perangkat Daerah</b>					<b>Perangkat Daerah</b>				
8.01.01.2, 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	5.000.000		
8.01.01.2, 05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000		
8.01.01.2, 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	35 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	35 Paket	0		
8.01.01.2, 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut	1 Dokumen	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut	1 Dokumen	0		
8.01.01.2, 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Garut	1 Dokumen	5.000.000		
8.01.01.2, 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut	35 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut	35 Orang	0		
<b>8.01.01.2, 06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	395.653.135	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	395.653.135		
8.01.01.2, 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	12.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	12.800.000		
8.01.01.2, 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	60.176.715	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	60.176.715		
8.01.01.2, 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	11.092.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	11.092.600		
8.01.01.2, 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	58.682.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	58.682.800		
8.01.01.2, 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Dokumen	9.612.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Garut	1 Dokumen	9.612.000		
8.01.01.2, 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	1 Laporan	33.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	1 Laporan	33.250.000		

8.01.01.2, 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	95.585.420	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	95.585.420	
8.01.01.2, 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	16.681.100	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	16.681.100	
8.01.01.2, 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	97.772.500	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	97.772.500	
<b>8.01.01.2, 07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	4.928.480.00	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	4.928.480.00	
8.01.01.2, 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Garut	3 Unit	1.154.480.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Garut	3 Unit	1.154.480.00	
8.01.01.2, 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Garut	3 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Garut	3 Unit	0	
8.01.01.2, 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Garut	2 Unit	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Garut	2 Unit	0	
8.01.01.2, 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	30 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	30 Unit	0	
8.01.01.2, 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	3.774.000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	3.774.000.00	
<b>8.01.01.2, 08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	249.095.770	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	249.095.770	
8.01.01.2, 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut	1 Laporan	6.000.000	
8.01.01.2, 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	20.000.550	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	20.000.550	
8.01.01.2, 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	223.095.220	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	223.095.220	

	<b>8.01.01.2, 09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	99.290.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	99.290.000	
	8.01.01.2, 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Garut	15 Unit	55.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Garut	15 Unit	55.250.000	
	8.01.01.2, 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garut	3 Unit	29.840.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garut	3 Unit	29.840.000	
	8.01.01.2, 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Garut	10 Unit	14.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Garut	10 Unit	14.200.000	
	<b>8.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA</b>	Kab. Garut	90%	649.660.400	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA</b>	Kab. Garut	90%	649.660.400	
	<b>8.01.02.2, 01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	649.660.400	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	649.660.400	
	8.01.02.2, 01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	252.600	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	252.600	
	8.01.02.2, 01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kab. Garut	1 Dokumen	252.600	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kab. Garut	1 Dokumen	252.600	



		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan yang Disusun				Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan yang Disusun				
	8.01.02.2, 01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Garut	2000 Orang	498.954.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Garut	2000 Orang	498.954.800	
	8.01.02.2, 01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Garut	175 Orang	99.780.400	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Garut	175 Orang	99.780.400	
	8.01.02.2, 01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Garut	1 Laporan	420.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Garut	1 Laporan	420.000	
	8.01.02.2, 01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Garut	250 Keluarga	50.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Garut	250 Keluarga	50.000.000	
	<b>8.01.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN</b>	<b>PERSENTASE PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT</b>	Kab. Garut	72%	5.334.623.600	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN</b>	<b>PERSENTASE PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT</b>	Kab. Garut	72%	5.334.623.600	

		<b>MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>					<b>MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>					
	8.01.03.2, 01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	5.334.623.600	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	5.334.623.600	
	8.01.03.2, 01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	252.600	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	252.600	
	8.01.03.2, 01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	252.600	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	252.600	

		Daerah					Daerah					
	8.01.03.2, 01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	1020 Orang	5.322.652.300	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	1020 Orang	5.322.652.300	
	8.01.03.2, 01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	138 Orang	11.046.100	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	138 Orang	11.046.100	
	8.01.03.2, 01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	420.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	420.000	
	<b>8.01.04.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI</b>	<b>PERSENTASE ORMAS AKTIF</b>	Kab. Garut	90%	2.749.016.920	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI</b>	<b>PERSENTASE ORMAS AKTIF</b>	Kab. Garut	90%	2.749.016.920	

		<b>KEMASYARAKATAN</b>					<b>KEMASYARAKATAN</b>					
	<b>8.01.04.2, 01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	2.749.016.920	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	2.749.016.920	
	8.01.04.2, 01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	1.513.600	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	1.513.600	
	8.01.04.2, 01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	1.793.600	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	1.793.600	
	8.01.04.2, 01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	140 Orang	2.730.670.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	140 Orang	2.730.670.800	
	8.01.04.2, 01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	8 Orang	12.510.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Garut	8 Orang	12.510.000	
	8.01.04.2, 01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Kab. Garut	1 Laporan	2.528.920	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Kab. Garut	1 Laporan	2.528.920	

		Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
	<b>8.01.05.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>PERSENTASE PEMBINAAN KETAHANAN EKOSOSBUD YANG TERFASILITASI</b>	Kab. Garut	90%	476.327.400	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>PERSENTASE PEMBINAAN KETAHANAN EKOSOSBUD YANG TERFASILITASI</b>	Kab. Garut	90%	476.327.400	
	<b>8.01.05.2, 01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	476.327.400	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	476.327.400	
	8.01.05.2, 01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	3.167.200	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	3.167.200	
	8.01.05.2, 01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	2.157.800	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	2.157.800	
	8.01.05.2, 01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kab. Garut	540 Orang	461.691.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kab. Garut	540 Orang	461.691.000	

		Kepercayaan di Daerah	Kepercayaan di Daerah				Kepercayaan di Daerah	Kepercayaan di Daerah				
	8.01.05.2, 01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	8 Orang	5.160.400	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	8 Orang	5.160.400	
	8.01.05.2, 01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	4.151.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	4.151.000	
	<b>8.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kab. Garut	100%	8.107.308.575	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kab. Garut	100%	8.107.308.575	
	<b>8.01.06.2, 01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	8.107.308.575	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun</b>	Kab. Garut	1 Dokumen	8.107.308.575	
	8.01.06.2, 01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Kab. Garut	1 Dokumen	2.462.400	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Kab. Garut	1 Dokumen	2.462.400	

		Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				
8.01.06.2, 01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	2.462.400	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Garut	1 Dokumen	2.462.400		
8.01.06.2, 01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	5705 Orang	2.685.017.600	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	5705 Orang	2.685.017.600		
8.01.06.2, 01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	3218 Orang	1.162.772.575	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Garut	3218 Orang	1.162.772.575		
8.01.06.2,	Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil	Kab.	1	4.593.600	Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil	Kab.	1	4.593.600		

	01.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Garut	Laporan		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Garut	Laporan			
	8.01.06.2, 01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	4.250.000.00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	4.250.000.00		
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>26.596.837.795</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>26.596.837.795</b>

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah RI (2023).



Tabel 2. 11

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capai an RKPD Tahu n 2021	Praki raan Capa ian Targ et RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Loka si	Sumbe r Dana		Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif					
						Sem ula	Menj adi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an				Nasio nal	Daera h								
<b>8</b>						<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
<b>8</b>	<b>0</b>					<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								<b>131.265.</b>									
	<b>1</b>							<b>135.296.</b>	<b>24.687.</b>	<b>26.596.</b>			<b>550.376</b>										
								<b>883.844</b>	<b>694.437</b>	<b>837.795</b>													
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>PROGRAM</b>	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<b>%</b>		<b>%</b>	100 %	100 %	<b>10.581.1</b>	<b>9.541.2</b>	<b>9.279.9</b>		100 %	<b>6.138.96</b>					
		<b>1</b>				<b>URUSAN</b>							<b>32.844</b>	<b>96.937</b>	<b>00.900</b>		<b>9.876</b>						
						<b>PEMERIN</b>																	
						<b>TAHAN</b>																	
						<b>DAERAH</b>																	
						<b>KABUPAT</b>																	
						<b>EN/KOTA</b>																	
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2, 0 1			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok ume n		Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	<b>137.378.</b>	<b>137.378</b>	<b>137.378</b>		1 Dok ume n	<b>130.000.</b>					
													<b>150</b>	<b>.150</b>	<b>.150</b>			<b>000</b>					
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2, 0 1	0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dok ume n	1 Doku men	10.593.7 50	10.593.7 50	10.593.7 50	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Dok ume n	5.000.00 0	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik



8	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	4.750.000	4.750.000	Kab. Garut Semu a Kecamatan Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	5.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.446.000	5.446.000	5.446.000	Kab. Garut Semu a Kecamatan Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	5.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	102.338.400	102.338.400	102.338.400	Kab. Garut Semu a Kecamatan Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>3.788.798.589</b>	<b>3.672.674.802</b>	<b>3.460.003.845</b>						1 Dokumen	<b>3.835.000.000</b>	
8	0	0	2,	0	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima				35 Orang/b	ul3a5n	ulan 3,770,798,589	3.654.674.802	3.442.003.845	Kab. Garut Semu	PENDA PATAN ASLI			Badan Kesatuan	35 Orang/b	ulan 3,800,000,000	Badan Kesatuan

					Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN					Oran g/b										a Keca mata n Semu a Kelur ahan	DAERA H (PAD) Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum				Bangs a dan Politik				Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lapo ran	1 Lapo ran	5.000.00	5.000.00	5.000.00	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum								Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Lapo ran	5.000.00			Badan Kesatu an Bangs a dan Politik	
8	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Lapo ran	1 Lapo ran	13.000.00	13.000.00	13.000.00	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum								Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Lapo ran	5.000.00			Badan Kesatu an Bangs a dan Politik	
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok ume n		Doku men	1 Dok ume n	1 Dok ume n	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>											1 Dok ume n	<b>35.000.00</b>				
8	0	0	2,	0	Rekonsilia si dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Lapo ran	1 Lapo ran	5.000.00	5.000.00	5.000.00	Kab. Garut Semu a Keca mata	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi								Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Lapo ran	5.000.00			Badan Kesatu an Bangs a dan Politik	

					Daerah pada SKPD													n Semu a Kelur ahan	Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum											
8	0	0	2,		<b>Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok ume n		Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	<b>74.570.3 00</b>	<b>5.000.0 00</b>	<b>5.000.0 00</b>							1 Dok ume n	<b>250.000. 000</b>								
8	0 1	0 1	2, 0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Pake t	35 Paket	20.650.3 00	0	0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r , Umum-Dana Alokasi Umum				Badan Kesat uan Bangsa a dan Politik	35 Pake t	10.000.0 00	Badan Kesatu an Bangsa a dan Politik							
8	0 1	0 1	2, 0 5	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai an	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dok ume n	1 Doku men	5.000.00 0	0	0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r , Umum-Dana Alokasi Umum				Badan Kesat uan Bangsa a dan Politik	1 Dok ume n	5.000.00 0	Badan Kesatu an Bangsa a dan Politik							
8	0 1	0 1	2, 0 5	0 5	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dok ume n	1 Doku men	5.000.00 0	5.000.00 0	5.000.00 0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum				Badan Kesat uan Bangsa a dan Politik	1 Dok ume n	5.000.00 0	Badan Kesatu an Bangsa a dan Politik							

8	0	0	2,	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Oran g	35 Oran g	43.920.000	0	0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r , Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	35 Oran g	100.000.000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok ume n		Doku men	1 Dok ume n	1 Dokumen	<b>669.966.900</b>	<b>444.378.215</b>	<b>395.653.135</b>					Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Dok ume n	<b>438.052.180</b>	
8	0	0	2,	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Pake t	1 Paket	12.800.000	12.800.000	12.800.000	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Pake t	10.000.000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Pake t	1 Paket	60.176.400	60.176.715	60.176.715	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Pake t	90.000.000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Pake t	1 Paket	5.696.800	11.092.600	11.092.600	Kab. Garut Semu a Keca mata n	Dana Transfe r Umum-Dana Bagi Hasil			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Pake t	5.000.000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik

															Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum						
8	0	0	2,	0	Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan				1	1	65.000.0	58.682.8	58.682.8	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Pake t	103.052. 180	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1	1	9.612.00	9.612.00	9.612.00	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Dok ume n	10.000.0 00	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1	1	81.700.0	55.602.5	33.250.0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Lapo ran	80.000.0 00	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik

8	0	0	2,	0	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lapo ran	1 Lapo ran	210.386. 000	121.958. 000	95.585.4 20	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil · Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Lapo ran	100.000. 000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	1	Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dok ume n	1 Doku men	16.681.1 00	16.681.1 00	16.681.1 00	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil · Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Dok ume n	5.000.00 0	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	1	Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dok ume n	1 Doku men	207.914. 600	97.772.5 00	97.772.5 00	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil · Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	1 Dok ume n	20.000.0 00	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2,		<b>Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok ume n	Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	<b>5.730.47 0.450</b>	<b>4.928.4 80.000</b>	<b>4.928.4 80.000</b>							1 Dok ume n	<b>1.045.00 0.000</b>	



					h Daerah																	
8	0	0	2,	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	435.592. 000	1.154.48 0.000	1.154.48 0.000	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	3 Unit	440.000. 000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	101.520. 000	0	0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	3 Unit	100.000. 000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.930.0 00	0	0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	2 Unit	30.000.0 00	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	162.428. 450	0	0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesat uan Bangs a dan Politik	30 Unit	125.000. 000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik

8	0	0	2,	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.00 0.000	3.774.00 0.000	3.774.00 0.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>54.158.455</b>	<b>249.095.770</b>	<b>249.095.770</b>						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	<b>95.917.696</b>	
8	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	6.960.00 0	6.000.00 0	6.000.00 0	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	20.000.550	20.000.550	20.000.550	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	27.197.905	223.095.220	223.095.220	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	29.917.696	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	





					Sejarah Kebangsaan																		
8	0	0	2,	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			1	1	4.000.000	252.600	252.600	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda	1		25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			2000	2000	518.900.000	641.068.300	498.954.800	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda	2000		700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan			175	175	190.575.400	99.780.400	99.780.400	Kab. Garut Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana		2. Peningkatan Dukungan Kehid	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,	175		50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

					Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							n Semua Kelurahan	Alokasi Umum		upan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Tokoh Pemuda					
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1	1	12.000.000	420.000	420.000	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda	1		50.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,	0	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran				250	a250	a	50.000.000	50.000.000	Kab. Garut Semua Kecamatan Semu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh	250		a		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

				kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalaan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalaan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
8	0	0		<b>PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	%		%	72 %	72 %	<b>108.613.502.700</b>	<b>5.334.623.600</b>	<b>5.334.623.600</b>						Pemuda		72 %	<b>109.745.559.000</b>	
8	0	0	2,01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>108.613.502.700</b>	<b>5.334.623.600</b>	<b>5.334.623.600</b>								1 Dokumen	<b>109.745.559.000</b>	

					<b>n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun															
8	0	0	2,	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			1	1	6.000.000	252.600	252.600	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu	1 Dokumen	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																							
8	01	03	20	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	252.600	252.600	Kab. Garut Sumatera Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu	1 Dokumen	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
8	01	03	20	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan				1020 Orang	1020 Orang	108.579.502.700	5.322.652.300	5.322.652.300	Kab. Garut Sumatera Kecamatan Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfe		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama,	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda,	1020 Orang	109.595.559.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						

					Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							Kelurahan	r Umum-Dana Alokasi Umum		Budaya Gotong Royong, Ketertarikan dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu			
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			138	138	12.000.000	11.046.100	11.046.100	Kab. Garut Semu a Kecamatan Semu a Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu	138	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	0	0	2,	0	an Situasi Politik di Daerah																			
1	3	0	1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1	1	12.000.000	420.000	420.000	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu	1 Laporan	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Ormas Aktif	%	%	90 %	90 %	<b>3.310.321.500</b>	<b>2.708.452.600</b>	<b>2.749.016.920</b>									90 %	<b>3.310.321.500</b>	

8	0	0	2,		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>3.310.32 1.500</b>	<b>2.708.4 52.600</b>	<b>2.749.0 16.920</b>				1 Dokumen	<b>3.310.32 1.500</b>			
8	0	0	2,	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9.792.400	2.353.600	1.513.600	Kab. Garut	Dana Transfer, Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7.953.500	2.913.600	1.793.600	Kab. Garut	Dana Transfer, Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

					Ormas, Pengawa san Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
8 1	0 4	0 1	2, 0 1	0 3	Pelaksana an Kebijakan di Bidang Pendaftara n Ormas, Pemberday aan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasa n Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				140 Oran g	140 Oran g	3.254.03 1.700	2.680.80 6.400	2.730.67 0.800	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r . Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pening katan Dukun gan Kehid upan Beraga ma, Budaya Goton g Royon g. Ketent raman dan Keterti ban serta Politik dan Demok rasi	Organ isasi Kemas yarak atan	140 Oran g	3.160.32 1.500	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8 1	0 4	0 1	2, 0 1	0 4	Pelaksana an Koordinasi di Bidang Pendaftara n Ormas, Pemberday aan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasa n Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				8 Oran g	8 Oran g	27.455.9 00	19.200.0 00	12.510.0 00	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r . Umum- Dana Alokasi Umum			Organ isasi Kemas yarak atan	8 Oran g	50.000.0 00	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik

8	0	0	2,	0	Pelaksana an Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftara n Ormas, Pemberdaya an Ormas, Pemberdaya an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasa n Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Lapo ran	1 Lapo ran	11.088.0 00	3.179.00 0	2.528.92 0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r , Umum- Dana Alokasi Umum			Organ isasi Kemas yarak atan	1 Lapo ran	50.000.0 00	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0			<b>PROGRAM PEMBINA AN DAN PENGEMB ANGAN KETAHAN AN EKONOMI , SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekosobud yang Terfasilitasi	%	%	90 %	90 %	<b>1.050.00 0.000</b>	<b>491.547 .400</b>	<b>476.327 .400</b>						90 %	<b>1.050.00 0.000</b>		
8	0	0	2,	0	<b>Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Ketahana n Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun	Dok ume n	Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	<b>1.050.00 0.000</b>	<b>491.547 .400</b>	<b>476.327 .400</b>						1 Dok ume n	<b>1.050.00 0.000</b>		
8	0	0	2,	0	Penyusuna n Program Kerja di	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang			1 Dok	1 Doku men	15.371.1 00	4.987.20 0	3.167.20 0	Kab. Garut Semu	Dana Transfe r			Tokoh Masya rakat,	1 Dok	25.000.0 00	Badan Kesatu an	

					Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan				ume n					a Keca mata n Semu a Kelur ahan	, Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Agama, Tokoh Pemuda	ume n		Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan				1 Dok ume n	1 Doku men	7.214.900	3.557.800	2.157.800	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r , Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda	1 Dok ume n	25.000.000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan				540 Oran g	540 Oran g	995.142.700	461.691.000	461.691.000	Kab. Garut Semu	Dana Transfe r	2. Pening katan	Tokoh Masyarakat,	540 Oran g	900.000.000	Badan Kesatu an	

					di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							a Kecamatan Semu Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Tokoh Agama, Tokoh Pemuda				Bangsa dan Politik	
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				8	8	23.195.000	15.850.400	5.160.400	Kab. Garut Semu Kecamatan Semu Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda	8	50.000.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di				1	1	9.076.300	5.461.000	4.151.000	Kab. Garut Semu	Dana Transfer		Tokoh Masyarakat, Tokoh	1	50.000.000		Badan Kesatuan Bangsa



					dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							Kecamatan Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum			Agama, Tokoh Pemuda			a dan Politik
8	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	%	100 %	100 %	<b>10.659.776.600</b>	<b>5.820.000.000</b>	<b>8.107.308.575</b>				100 %	<b>9.870.700.000</b>		
8	0	0	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun Kewaspadaan</b>	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>10.659.776.600</b>	<b>5.820.000.000</b>	<b>8.107.308.575</b>				1 Dokumen	<b>9.870.700.000</b>		

					<b>aan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>																	
8	0	0	2,	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1	1	10.000.000	2.462.400	2.462.400	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Instansi Vertikal	1	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2,	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan				1	1	5.500.000	2.462.400	2.462.400	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Instansi Vertikal	1	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

					Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun															
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5705 Oran g	5705 Oran g	2.951.135.000	2.322.745.300	2.685.017.600	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r , Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Instansi Vertikal	5705 Oran g	3.060.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	0	0	2,	0	Pelaksana an Koordinasi di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembaga an Bidang Kewaspada an, serta Penangan an Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3218 Oran g	3218 Oran g	4.400.00 0.000	1.237.73 6.300	1.162.77 2.575	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r . Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pening katan Dukun gan Kehid upan Beraga ma, Buday a Goton g Royon g, Ketent raman dan Keterti ban serta Politik dan Demok rasi	Tokoh Masya rakat, Tokoh Agam a, Tokoh Pemu da, Instan si Vertik al	3218 Oran g	4.400.00 0.000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik
8	0	0	2,	0	Pelaksana an Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau an Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,				1 Lapo ran	1 Lapo ran	5.500.00 0	4.593.60 0	4.593.60 0	Kab. Garut Semu a Keca mata n Semu a Kelur ahan	Dana Transfe r . Umum- Dana Alokasi Umum		Tokoh Masya rakat, Tokoh Agam a, Tokoh Pemu da, Instan si Vertik al	1 Lapo ran	100.000. 000	Badan Kesatu an Bangs a dan Politik	

					Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	serta Penanganan Konflik di Daerah																
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			1	1	3.287.64	2.250.00	4.250.00	Kab. Garut Semu a Kecamatan Semu a Kelurahan	Dana Transfer , Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Instansi Vertikal	1	2.250.00	0.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>TOTAL</b>											<b>135.296.883.844</b>	<b>24.687.694.437</b>	<b>26.596.837.795</b>							<b>131.265.550.376</b>		

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
  - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;



- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
- c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan umum di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kesatu yaitu mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya kualitas bina karakter bangsa, serta sasaran

1. Terwujudnya Kebebasan Sipil;
2. Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat;
3. Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol;

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah PPD 2 Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 175 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 yaitu: Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa, dengan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran SKPD Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kebebasan Sipil, dengan indikator:
  - a. Tingkat Kebebasan Berkeyakinan;
  - b. Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat;
2. Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat, dengan indikator:
  - a. Tingkat Kebebasan Berpendapat;
  - b. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik;
3. Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol, dengan indikator Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol;

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa	Indeks Demokrasi Indonesia	Terwujudnya Kebebasan Sipil	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	75%
				Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	80%
			Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	Tingkat Kebebasan Berpendapat	90%
				Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	72%
			Meningkatnya Kapasitas	Tingkat Akuntabilitas	Kategori Sangat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Bakesbangpol	Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Baik

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023**

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Jumlah Anggaran
1	Bakesbangpol	6	13	56
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>56</b>
				<b>26.245.921.876</b>

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
  - c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik;
  - d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
  - f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan;
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 56 subkegiatan;
5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.596.837.795,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp136.296.883.844,- mengalami penyesuaian sebesar Rp111.609.189.407,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp24.687.694.437,- dan pada Parsial 1 menjadi Rp24.245.921.876,- lalu pada Parsial 2 menjadi Rp26.245.921.876,- kemudian pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp26.596.837.795,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	120
---	-----

pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	121

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Progra m	Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Tar get		
						Sebe lum	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah	Sebe lum	Sesu dah									
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
8	0 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										24.687.6 94.437	26.596.8 37.795		131,265, 550,3 76					
8	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										9.541.29 6.937	9.279.90 0.900		6.138.96 9.876					
8	0 1 1	0 1 1	2, 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemen uhan Perenc anaan Kinerja SKPD dan Pelapor an Kinerja dan Keuang an yang tepat waktu dan sesuai peratur an Perund ang- undang an di Badan Kesatu an	Jumlah Dokumen Perencana an, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Akuntab ilitas Pelayan an Publik dan Akuntab ilitas Kinerja Bakesba ngpol	Kab. Garut, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	100 %	100 %	1 Doku men	1 Doku men	89 Kate gori Sang at Baik	89 Kate gori Sang at Baik	137.378. 150	137.378. 150	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemen uhan Perenc anaan Kinerja SKPD dan Pelapor an Kinerja dan Keuang an yang tepat waktu dan sesuai peratur an Perund ang- undang an di Badan Kesatu an	100 %	130.000. 000

						<b>Bangsa dan Politik</b>													<b>Bangsa dan Politik</b>				
8	0	0	2,01	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	10.593.750	10.593.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	5.000.000
8	0	0	2,01	0	2	Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat	100%	5.000.000



						waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
8	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	5.000.000
8	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan	Persentase pemenuhan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan	Kab. Garut, Semua Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat	89 Kategori Sangat	4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase pemenuhan	100%	5.000.000

					n DPA-SKPD	Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	n Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	atan, Semua Kelurahan					at Baik	at Baik			Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	4.750.000	4.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-	100 %	5.000.000

						undang an di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik													undang an di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	5.446.000	5.446.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik	100 %	5.000.00 0	
8	0	0	2,	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	102.338.4 00	102.338.4 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan	100 %	100.000. 000	

						Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Alokasi Umum		Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	3.672.674.802	3.460.003.845	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan	100%	3.835.000.000

						<b>Bangsa dan Politik</b>													<b>Bangsa dan Politik</b>			
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	3.654.674.802	3.442.003.845	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	3.800.000.000
8	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	5.000.000.000

						an yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													an yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	13.000.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000

8	0	0	2,		Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persent ase pemu han Perenc anaan Kinerja SKPD dan Pelapor an Capaia n Kinerja dan Keuang an yang tepat waktu dan sesuai peratur an Perund ang- undang an di Badan Kesatu an Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Akuntab ilitas Pelayan an Publik dan Akuntab ilitas Kinerja Bakesba ngpol	Kab. Garut, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	100 %	100 %	1 Doku men	1 Doku men	89 Kate gori Sang at Baik	89 Kate gori Sang at Baik	5.000.00 0	5.000.00 0	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase pemu han Perenc anaan Kinerja SKPD dan Pelapor an Capaia n Kinerja dan Keuang an yang tepat waktu dan sesuai peratur an Perund ang- undang an di Badan Kesatu an Bangsa dan Politik	100 %	35.000.0 00
8	0	0	2,	0	Rekonsilias i dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persent ase pemu han Perenca naan Kinerja SKPD dan Pelapor an Capaian Kinerja dan Keuang an yang tepat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Akuntab ilitas Pelayana n Publik dan Akuntab ilitas Kinerja Bakesba ngpol	Kab. Garut, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	100 %	100 %	1 Lapor an	1 Lapor an	89 Kateg ori Sang at Baik	89 Kateg ori Sang at Baik	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase pemu han Perenca naan Kinerja SKPD dan Pelapor an Capaian Kinerja dan Keuang an yang tepat	100 %	5.000.00 0

						waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,	0	Administra	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	250.000.000
8	0	0	2,	0	Pengadaan	Persentase	Jumlah Paket	Tingkat Akuntab	Kab. Garut,	100 %	100 %	35 Paket	35 Paket	89 Kateg	89 Kateg	0	0	Dana Transfer	Persentase	100 %	10.000.000



					Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	ilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Semua Kecamatan, Kelurahan					ori Sangat Baik	ori Sangat Baik			Umum-Dana Alokasi Umum		pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai	100 %	5.000.000

						peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	5.000.000	
8	0	0	2,	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Persentase pemenuhan Perencanaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	35 Orang	35 Orang	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan	100 %	100.000.000	

					n Tugas dan Fungsi	Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kelurahan										Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	0	0	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perund	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	444.378.215	395.653.135	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perund	100%	438.052.180

						<b>ang- undang an di Badan Kesatu an Bangsa dan Politik</b>													<b>ang- undang an di Badan Kesatu an Bangsa dan Politik</b>			
8	0	0	2,	0	Penyediaan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	12.800.000	12.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	10.000.000
8	0	0	2,	0	Penyediaan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	60.176.715	60.176.715	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan	100 %	90.000.000

						Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Bakesbangpol									Dana Alokasi Umum		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	11.092.600	11.092.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan	100 %	5.000.000

						Kesatuan Bangsa dan Politik													Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	58.682.800	58.682.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	103.052.180
8	0	0	2,	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	9.612.000	9.612.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	10.000.000

						dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	55.602.500	33.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa	100 %	80.000.000	

8	0	0	2,	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan Politik Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	121.958.000	95.585.420	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dan Politik Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100.000.000
8	0	0	2,	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	16.681.100	16.681.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang	100%	5.000.000



						tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	97.772.500	97.772.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	20.000.000	

8	0	0	2,		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	4.928.48 0.000	4.928.48 0.000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	1.045.00 0.000
8	0	0	2,	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	1.154.480 .000	1.154.480 .000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat	100 %	440.000. 000

						waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	100.000.000
8	0	0	2,	0	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan	Jumlah Paket Mebel	Tingkat Akuntabilitas	Kab. Garut, Semua	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	89 Kategori	89 Kategori	0	0	Dana Transfer Umum-	Persentase pemenuhan	100 %	30.000.000

						han Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	yang Disediakan	Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kecamatan, Semua Kelurahan					Sangat Baik	Sangat Baik			Dana Alokasi Umum		han Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	0	0	2,	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Unit	30 Unit	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	100 %	125.000.000

						an Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													an Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,07	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol		100%	100%	1 Unit	1 Unit	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	3.774.000.000	3.774.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	0
8	0	0	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	249.095.770	249.095.770	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja	100%	95.917.696

						SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Daerah	Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kelurahan								Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,08	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-	100%	10.000.000

						undang an di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik													undang an di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	20.000.55 0	20.000.55 0	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	20.000.0 00
8	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelapor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	223.095.2 20	223.095.2 20	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelapor	100 %	29.917.6 96

					an Capaian Kinerja dan Keuang an yang tepat waktu dan sesuai peratur an Perund ang- undang an di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik		Bakesba ngpol									Alokasi Umum		an Capaian Kinerja dan Keuang an yang tepat waktu dan sesuai peratur an Perund ang- undang an di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik			
8	0	0	2,		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol</b>	<b>Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>89 Kategori Sangat Baik</b>	<b>89 Kategori Sangat Baik</b>	<b>99.290.000</b>	<b>99.290.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan</b>	<b>100 %</b>	<b>280.000.000</b>



						<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>												<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
8	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	29.840.000	29.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	15.000.000
8	0	0	2,	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	89 Kategori Sangat Baik	89 Kategori Sangat Baik	14.200.000	14.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	5.000.000

						dan Keuang an yang tepat waktu dan sesuai peratur an Perund ang- undang an di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik													dan Keuang an yang tepat waktu dan sesuai peratur an Perund ang- undang an di Badan Kesatua n Bangsa dan Politik				
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>												<b>791.773.</b>	<b>649.660.</b>			<b>1.150.00</b>	<b>0.000</b>	
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,</b>	<b>01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Disusun</b>	<b>Tingkat Kebebasan Berkeyakinan</b>	<b>Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>75 %</b>	<b>75 %</b>	<b>791.773.</b>	<b>649.660.</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>		<b>Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila</b>	<b>90 %</b>	<b>1.150.00</b>	<b>0.000</b>
8	0	0	2,	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	75 %	75 %	252.600	252.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	25.000.00

					dan Sejarah Kebangsaan		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun															
8	0	0	2,	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	75 %	75 %	252.600	252.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	25.000.000
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2000 Orang	2000 Orang	75 %	75 %	641.068.300	498.954.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	700.000.000
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua	90 %	90 %	175 Orang	175 Orang	75 %	75 %	99.780.400	99.780.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi	90 %	50.000.000

					n, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pancasila	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kelurahan										Pancasila			
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	75 %	75 %	420.000	420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	50.000.000	
8	0	0	2,	0	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	250 Keluarga	250 Keluarga	75 %	75 %	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90 %	300.000.000	

					dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara															
8	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>										5.334.623.600	5.334.623.600					109,745,559,000	
8	0	0	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik</b>	<b>Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>72 %</b>	<b>72 %</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>72 %</b>	<b>72 %</b>	5.334.623.600	5.334.623.600	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat</b>	<b>72 %</b>	109,745,559,000

8	0	0	2,	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politikus Masyarakat	<b>yang Disusun</b> Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	1 Dokumen	1 Dokumen	72 %	72 %	252.600	252.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Politikus Masyarakat	72 %	25.000.000
8	0	0	2,	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Persentase Peningkatan Pemahaman Politikus Masyarakat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	1 Dokumen	1 Dokumen	72 %	72 %	252.600	252.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Politikus Masyarakat	72 %	25.000.000

					Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun															
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	1020 Orang	1020 Orang	72 %	72 %	5.322.652 .300	5.322.652 .300	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat	72 %	109,595, 559,00 0	

8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politikus Masyarakat	Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	138 Orang	138 Orang	72 %	72 %	11.046.100	11.046.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Politikus Masyarakat	72 %	50.000.000
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Persentase Peningkatan Pemahaman Politikus Masyarakat	Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 %	72 %	1 Laporan	1 Laporan	72 %	72 %	420.000	420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Politikus Masyarakat	72 %	50.000.000





					n Ormas dan Ormas Asing di Daerah		n Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun																	
8	0	0	2,	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkeputusan Berserikat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	2.913.600	1.793.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas Aktif	90 %	25.000.000		
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkeputusan Berserikat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	140 Orang	140 Orang	80 %	80 %	2.680.806.400	2.730.670.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas Aktif	90 %	3.160.321.500		
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran	Tingkat Kebebasan Berkeputusan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	8 Orang	8 Orang	80 %	80 %	19.200.000	12.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ormas Aktif	90 %	50.000.000		

					Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Berserikat	Kelurahan													
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas Aktif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	80 %	80 %	3.179.000	2.528.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ormas Aktif	90 %	50.000.000	
8	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>											491.547.400	476.327.400					1.050.000.000
8	0	0	2,	0	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Disusun</b>	<b>Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat</b>	<b>Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>491.547.400</b>	<b>476.327.400</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi</b>	<b>90 %</b>	<b>1.050.000.000</b>	

8	0	0	2,	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	3.557.800	2.157.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	90 %	25.000.000
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	540 Orang	540 Orang	80 %	80 %	461.691.000	461.691.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekososbud yang Terfasilitasi	90 %	900.000.000
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Persentase Pembinaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi	Tingkat Kebebasan Berkumpul	Kab. Garut, Semua Kecamatan	90 %	90 %	8 Orang	8 Orang	80 %	80 %	15.850.400	5.160.400	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Pembinaan	90 %	50.000.000

					Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ketahanan Ekosos bud yang Terfasilitasi	di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	pul Berserikat	atan, Semua Kelurahan								Alokasi Umum		Ketahanan Ekosos bud yang Terfasilitasi			
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekosos bud yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	80 %	80 %	5.461.000	4.151.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekosos bud yang Terfasilitasi	90 %	50.000.000	
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>										<b>5.820.000.000</b>	<b>8.107.308.575</b>				<b>9.870.700.000</b>		
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,</b>	<b>01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan</b>	<b>Persentase Penurunan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan</b>	<b>Tingkat Kebebasan Berpendapat</b>	<b>Kab. Garut, Semua Kecamatan,</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	<b>5.820.000.000</b>	<b>8.107.308.575</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana</b>	<b>Persentase Penurunan</b>	<b>100 %</b>	<b>9.870.700.000</b>	

					<b>Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Konflik Sosial</b>	<b>Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang Disusun</b>		<b>Semua Kelurahan</b>									<b>Alokasi Umum</b>		<b>Konflik Sosial</b>		
8	0	0	2,	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	2.462.400	2.462.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	10.000.000
8	0	0	2,	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	2.462.400	2.462.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	50.000.000

					Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun															
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5705 Orang	5705 Orang	90 %	90 %	2.322.745.300	2.685.017.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	3.060.700.000

8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3218 Orang	3218 Orang	90 %	90 %	1.237.736.300	1.162.772.575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	4.400.000.000
8	0	0	2,	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	4.593.600	4.593.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100 %	100.000.000



					Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembaga an Bidang Kewaspada an, serta Penangana n Konflik di Daerah		Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspada an, serta Penangana n Konflik di Daerah															
8	0	0	2,	0	Pelaksanaa n Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Persent ase Penuru nan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kebebas an Berpend apat	Kab. Garut, Semua Kecama tan, Semua Kelura han	100 %	100 %	1 Doku men	1 Doku men	90 %	90 %	2.250.000 .000	4.250.000 .000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase Penuru nan Konflik Sosial	100 %	2.250.00 0.000
																<b>TOTAL</b>	<b>24.687.6 94.437</b>	<b>26.596.8 37.795</b>			<b>131,265, 550,3 76</b>	

Sumber : Renja Perubahan, SIPD 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

<b>Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023</b>	165
---	-----

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN